



PERAN DAN KONTRIBUSI ADINEGORO PADA JURNALISME DI INDONESIA

Lestantya R. Baskoro¹, Wahyudi Marhaen Pratopo^{2*}

¹ Press Institute of Doctor Soetomo; ² Department of Communication, Universitas Pertamina

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 29, 2023
Revised November 30, 2023
Accepted December 03, 2023
Available online December 07, 2023

The development of journalism can be traced from the history of the media industry and journalism practices as well as the thought of its practitioners. This paper wants to explain the role of Adinegoro in Indonesian journalism. The research uses a constructivist paradigm and qualitative methods. The researchers conducted a literature study, observation, and interview to gather data. The research results show that Adinegoro played a significant role in developing the press, journalism, and language in Indonesia through his involvement in several newspapers, news agencies, journalism thought, and the Indonesian Language Congress.

Keywords:

Adinegoro, journalism, press

1. PENDAHULUAN

Sejarah pers dan jurnalisme Indonesia dimulai pada masa penjajahan dengan munculnya usaha-usaha percetakan dan penerbitan Belanda dan Tionghoa. Pada zaman Hindia Belanda itu dikenal adanya pers Belanda, Melayu-Tionghoa, dan Indonesia. Pers Belanda menyuarakan kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial dan berorientasi ke Belanda atau Eropa. Pers Melayu Tionghoa pada masa Hindia Belanda menyuarakan kepentingan warga Tionghoa dan gagasan nasionalisme Tionghoa, serta kepentingan para usahawan Tionghoa. Pers nasional Indonesia menyuarakan kepentingan warga Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perkembangan pers nasional Indonesia sebagian dipengaruhi oleh adanya usaha percetakan dan penerbitan Belanda dan Tionghoa dan sebagian lagi karena munculnya elite Indonesia yang memerlukan media komunikasi (Surjomihardjo, 2004).

Surat kabar yang dianggap sebagai pelopor pers nasional adalah *Medan Prijaji* yang dipimpin oleh R.M. Tirtoadisuryo. *Medan Prijaji* terbit di Bandung sejak 1907 sebagai mingguan, kemudian menjadi harian sejak 1910. Tirtoadisuryo yang pernah bekerja di *Bintang Betawi*, juga menerbitkan *Soeloeh Keadilan*.

Sebelumnya sudah ada sejumlah surat kabar pribumi yang terbit pada abad 19. Surat kabar berbahasa non-Belanda pertama adalah *Bromartani* yang terbit di Solo pada 1855 dengan bahasa Jawa. Kemudian muncul surat kabar berbahasa Melayu seperti *Slomporet Melajoe* (1860-1911), *Bianglala* (1868-1872), *Bintang Djohar*, *Tjahaja Moelia*, dan lainnya.

Pers nasional Indonesia makin berkembang pada awal abad 20 dengan terbitnya sejumlah surat kabar yang memiliki kaitan dan menyuarakan kepentingan organisasi sosial dan politik seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, *Indische Partij*, dan Partai Komunis Indonesia. Boedi Oetomo memiliki surat kabar *Darmo Kondo*, Sarekat Islam memiliki *Oetoesan Hindia*, *Sinar Djawa*, *Pancaran Warta*, dan *Saroetomo*, sedangkan *Indische Partij* memiliki surat kabar *Het Tijdschrift* dan *De Expres*. *Tjaja Timur* dan *Kaoem Moeda* juga condong mendukung pemikiran *Indische Partij*. Pendiri *Indische Partij* Tjipto Mangunkusumo kemudian juga menerbitkan majalah *De Indier* dan

*Corresponding author.

E-mail: wahyudi.mpes@univeritaspertamina.ac.id

R.M. Suwardi Suryaningrat mendirikan majalah *Hindia Poetra*. PKI pada akhir tahun 1926 memiliki 20 penerbitan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Perkembangan pers pada masa penjajahan tersebut tentu juga memunculkan para praktisi media, yang pada umumnya juga merupakan tokoh pergerakan nasional. Beberapa nama di antaranya adalah Tirto Adhi Surjo, Mohammad Hatta, Tan Malaka, Parada Harahap, Sanusi Pane, Muhammad Yamin, Amir Sjarifuddin, Abdul Muis, Haji Agus Salim, Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, Fachroedin, Djamaludin Adinegoro, W.R. Supratman, Muhammad Husni Thamrin, dan lainnya.

Nama Adinegoro cukup populer di kalangan komunitas pers di Indonesia hingga sekarang karena namanya diabadikan sebagai penghargaan karya jurnalistik terbaik yang diberikan setiap tahun pada peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang memberikan Anugerah Adinegoro sebagai penghargaan karya jurnalistik terbaik di Tanah Air tentu memiliki alasan kuat untuk memilih namanya. Pemerintah pun sangat beralasan untuk memberikan gelar kepada Adinegoro sebagai “Perintis Pers Indonesia.” Semua itu tak lepas dari peran dan kontribusi Adinegoro dalam memajukan pers dan jurnalisme di Tanah Air.

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini akan menjawab pertanyaan: Bagaimana peran dan kontribusi Adinegoro pada jurnalisme di Indonesia? Tujuannya untuk menjelaskan peran dan kontribusi Adinegoro dalam perkembangan jurnalisme di Indonesia sehingga memberikan pengertian yang komprehensif tentang jasa-jasa dan ketokohnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Metode penelitian kualitatif dipakai karena topik permasalahan yang diangkat mengharuskan peneliti untuk menganalisis, menelaah, menjelaskan data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat atau kata-kata, deskripsi, dan gambar.

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme karena merupakan sebuah cara pandang yang melihat dunia sosial sebagai hasil konstruksi yang dibangun dari pemaknaan dan pengalaman masyarakat (Denzin & Lincoln, 2018). Menurut Bungin (2011), konstruktivisme merupakan hasil kerja kognitif dari individu dalam menafsirkan dunia realitas yang ada. Paradigma konstruktivisme memandang realitas sosial bersifat relatif, dimana realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial itu sendiri.

Untuk mengetahui dan menjelaskan peran dan kontribusi Adinegoro pada jurnalisme di Indonesia, penelitian menggunakan metode sejarah atau metode historis. Metode Sejarah merupakan rekonstruksi imajinatif mengenai gambaran masa lampau tentang peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disajikan dalam bentuk penulisan sejarah (Ismaun dkk., 2016).

Metode historis tersebut dilaksanakan dalam empat tahapan berikut: 1. Heuristik, yaitu tahapan/kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejak masa lampau; 2. Kritik, yaitu tahapan/kegiatan meneliti sumber, informasi, jejak tersebut secara kritis, yang terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal; 3. Interpretasi, yaitu tahapan/kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang diperoleh; 4. Historiografi, yaitu tahapan/kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya. Dengan istilah lain, tahapan historiografi ialah tahapan kegiatan penulisan. Hasil penafsiran atas fakta-fakta itu dituliskan menjadi suatu kisah yang selaras dengan menerapkan kemahiran mengarang atau *art of writing* (Herlina, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumen, wawancara, dan observasi. Peneliti menelaah sejumlah buku karya Adinegoro dan buku karya orang lain tentang Adinegoro, serta sejumlah dokumen dan laporan media yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti juga mendatangi tempat asal Adinegoro di Talawi, Sumatera Barat, serta mewawancarai sejumlah narasumber, termasuk anaknya. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapat informasi lain yang diperlukan dan mengecek ulang berbagai pernyataan atau isi dokumen yang memerlukan klarifikasi.

3. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Adinegoro merupakan anak tunggal pasangan Usman Bagindo Chatib-Sadariah. Nama asli Adinegoro adalah Djamaluddin—yang bermakna “keindahan agama”. Dilahirkan pada 14 Agustus 1904 di Talawi, yang kini bagian dari Kabupaten Sawahlunto, berjarak sekitar 110 kilometer dari Padang. Adinegoro menghabiskan masa kanak-kanaknya di Talawi.

Adinegoro merupakan adik tiri —satu ayah lain ibu— dari Pahlawan Nasional Muhammad Yamin, yang juga lahir di tempat yang sama. Talawi pada masa kanak-kanak Adinegoro dan Muhammad Yamin penuh dengan persawahan. Di daerah itu mengalir Sungai Ombilin yang berair jernih. Bocah-bocah Talawi kerap menceburkan diri ke dalam sungai tersebut. (Majalah *Tempo*, Muhammad Yamin, 18-25 Agustus 2014).

Seperti Muhammad Yamin, Adinegoro juga dilahirkan di rumah gadang Usman Bagindo Chatib yang terletak dekat pasar Talawi. Rumah gadang itu kini telah runtuh dan hanya tinggal undak-undakannya yang terbuat dari bata disemen. Saat masih berdiri rumah gadang tersebut terdiri atas lima ruangan dan menghadap ke barat. Menurut Soebagijo Ilham Notodidjojo (1987), rumah tersebut didirikan oleh buyut Adinegoro, Datuk Madjoindo. Usman Bagindo menduduki posisi terhormat di masyarakat. Ia menjabat demang atau *districthoofd* di wilayah itu. Usman Bagindo Chatib (1858-1925) juga merupakan guru agama yang kerap berdakwah hingga ke luar Sumatera Barat.

Sebagai tokoh masyarakat, tak sulit bagi Usman Bagindo memasukkan Adinegoro ke *Europeesche Lagere School* (sekolah Belanda tingkat dasar). Usman Bagindo memang menaruh perhatian besar pada pendidikan anak-anaknya. Karena sering berpindah-pindah tugas, Usman Bagindo kemudian menitipkan Adinegoro kepada Muhammad Yamin yang bekerja sebagai guru di Palembang. Dari Palembang Adinegoro kemudian melanjutkan pendidikan ke *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA), sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia. Stovia juga dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa. Pendirian sekolah ini tak lepas dari minimnya tenaga kesehatan ketika menghadapi berbagai wabah penyakit saat itu. Pada 2 Januari 1849 Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur mengenai kursus juru kesehatan. Pada 1853 kursus itu ditingkatkan menjadi Sekolah Dokter Jawa melalui Surat Keputusan Gubernur No. 10.

Saat menjadi mahasiswa Stovia, Adinegoro masih memakai nama Djamaluddin. Di sekolah yang terletak di Kawasan yang kini bernama “Senen,” di Jakarta Pusat tersebut Adinegoro selain di kelas dan ruang laboratorium, banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Perpustakaan Stovia tidak hanya menyediakan bacaan-bacaan kesehatan atau ilmu kedokteran, juga bacaan umum, surat kabar, dan majalah.

Salah satu majalah yang menarik hati pemuda Djamaluddin adalah Majalah *Tjaja Hindia* (dibaca: Cahaya Hindia) milik Landjumin Datuk Tumenggung. Menurut Taufik Rahzen (2008), *Tjaja Hindia* merupakan majalah dua mingguan dan isinya berita-berita bukan berita politik.

Landjumin Datuk Tumenggung merupakan salah satu tokoh dari Sumatera di Batavia. Ia juga pemimpin redaksi Surat Kabar *Neraca*. Tumenggung memberi perhatian dan menjalin hubungan baik dengan mahasiswa atau penulis muda yang berasal dari Sumatera. Mereka di antaranya Bahder Djohan dan Agus Salim. Seperti halnya Douwes Dekker, Landjumin kerap mengundang para anak muda itu untuk bertemu dan berdiskusi.

Djamaluddin tidak hanya gemar membaca artikel pada *Tjaja Hindia*, ia juga kemudian mencoba menulis di majalah itu. Begitu tulisannya ternyata dimuat, ia semakin rajin menulis untuk majalah tersebut. Pada akhir artikelnya ia mencantumkan inisial namanya “Dj” sebagai kependekan “Djamaluddin”.

Pada suatu hari Landjumin Datuk Tumenggung menggelar acara pertemuan dengan para anak muda yang kerap menulis di medianya. Saat berbincang dengan Djamaluddin, ia mengusulkan kepada Djamaluddin agar untuk setiap artikelnya ia memakai nama “berbau Jawa.” Menurut Landjumin, jika memakai nama Jawa maka pembaca majalah atau artikelnya semakin banyak. Landjumin sendiri saat itu telah mengubah namanya menjadi ‘Notonegoro’. “Djamaluddin

setuju dan menanyakan apa nama yang pantas untuknya. Tumenggung menyebut “Adi Negoro”. Sejak itulah, setiap menulis artikel atau buku, Djamaluddin mengganti namanya menjadi “Adi Negoro.” Awalnya nama Adi Negoro merupakan dua kata terpisah, belakangan kemudian menyatu menjadi satu kata, Adinegoro.

Pada akhirnya, kegemaran Djamaluddin pada dunia jurnalistik mengalahkan studinya di STOVIA. Salah satu penulis yang sangat mempengaruhinya adalah Abdul Rivai, seorang dokter di Belanda yang kerap menulis di Koran *Bintang Timoer*. Tulisan Abdul Rivai menggugah Adinegoro untuk menjadi penulis sekaligus menjadikannya yakin seseorang bisa hidup dari menulis. Tekadnya untuk menjadi penulis makin bulat setelah ia pulang kampung pada 1 Januari 1926 dan dianugerahi gelar “Datuk Maharadjo Sutan”, sebuah gelar yang sekaligus melambangkan ia telah menjadi “manusia dewasa.”

Menuntut Ilmu di Eropa

Pada pertengahan 1926 Adinegoro berangkat ke Eropa. Ia naik kapal Tambora milik Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, maskapai pelayaran Belanda, dari Pelabuhan Tanjung Priok. Saat itu usianya 22 tahun. Kapal tersebut menempuh rute Selat Malaka, Laut Hindia, Laut Merah, Terusan Suez, Laut Tengah, dan berakhir di Belanda dengan waktu sekitar tiga pekan.

Sepanjang perjalanan, Adinegoro menulis apa saja yang ia lihat dan pandang menarik. Tidak hanya pandangan mata, ia juga membubuhkan tulisannya dengan sejarah atau hal lain, misalnya kebudayaan, berkaitan dengan objek yang ia tulis. Saat Tambora berlabuh di Singapura, misalnya, Adinegoro melukiskan keramaian pelabuhan kota itu. Dia juga berkeliling kota, masuk ke taman bunga dan pasar serta mampir di toko buku Methodist Publishing House, yang menjual buku-buku berbahasa Melayu.

Setelah meninggalkan Sabang dan melintasi Laut Hindia atau Samudra Hindia, kapal Tambora terus berada di perairan selama sekitar sepuluh hari tanpa singgah di pelabuhan mana pun. Meskipun demikian, Adinegoro tak kehabisan bahan tulisan. Dia kemudian banyak membahas kehidupan di kapal, seperti tentang radio, makanan bermenu Eropa, menongkrong di salon, pertunjukan musik, tempat bermain catur dan kartu, kamar tukang cukur, percakapan dalam berbagai bahasa, serta kerja mualim. Obrolannya dengan seorang awak kapal, misalnya, membuat dia menemukan kenyataan unik tentang asal-usul para awak kapal yang kemudian menjadi bahan tulisannya.

Awalnya Adinegoro berencana mengakhiri perjalanannya di Belanda. Namun, ketika Kapal Tambora merapat di Marseille, Prancis, pikirannya berubah. Dia memutuskan akan melihat Paris. Tentang Kota Paris yang ia sebut “pusat peradaban Eropa”, Adinegoro (1987) menulis, “Kalau orang pergi ke Eropa, jangan lupa pergi ke Paris. London, Stokholm atau Berlin boleh kita lampau, tapi Paris sumber sinar serba seni, harus dikunjungi. Siapa yang melawat ke Eropa dan kembali ke negerinya dengan tiada mengunjungi kota yang besar dan masyhur itu, lebih baik ia kembali sekali lagi supaya jangan menyesal.”

Di Paris Adinegoro melancong ke mana-mana. Dia menyusuri Cours Belsunce, jalan raya yang panjang dengan pohon-pohon rindang di kiri-kanannya dan sebuah jalur trem. Dia juga mengunjungi Cours Saint-Louis, tempat banyak gadis menjual bunga. Di Marseille sendiri Adinegoro mulai menyadari keberagaman bangsa Eropa—ada kemungkinan karena ia bertemu dengan banyak orang Eropa dari berbagai negara. Dia menulis, “Selagi saya di Hindia, sebagaimana kebanyakan orang kita, saya bersangka bahwa orang yang berkulit putih itu semua satu cap, satu tabiat, tiada ada berlainan. Orang Jerman misalnya betul lain negerinya dari orang Belanda, akan tetapi pada perasaan umum di Hindia mereka itu dalam batinnya tidak berbeda.”

Adinegoro kini membantah prasangka itu. Menurut dia, Eropa terdiri atas berbagai bangsa. Ia melanjutkan, bangsa Belanda berbeda dengan bangsa Jerman atau Prancis dan orang Inggris lebih dekat dengan bangsa Fries (kini bagian dari Belanda) daripada Prancis. “Saya rasa lebih baik dan lebih benar jika kita sebut bahwa Hindia itu satu, jangan menyebutkan Eropa itu satu. Orang Rus, nenek moyang bangsa Rusia, berlainan sekali tabiatnya dari orang Spanyol dan kita tahu bahwa orang Jerman dan Prancis negerinya berdekatan-dekatan tetapi hidupnya seperti anjing dan kucing,” tulis Adinegoro (1987).

Hal yang tak pernah luput dari perhatian Adinegoro setiap singgah di sebuah kota adalah kehidupan persnya. Tentang ini, misalnya, ia menulis, “Bagi saya, seorang penulis, inginlah saya hendak menyelidiki keadaan pers di Paris. Apalagi karena di negeri kita kemajuan pers lama-lama bertambah jelas juga. Telah jauhlah letaknya zaman kegelapan buat manusia Indonesia dan sekarang ini seperti cendawan tumbuh, terbitnya surat kabar harian dan berkala. Hal itu tentu menghiburkan hati kita, karena dengan jalan yang demikian itu berangsur juga berpindahnya penduduk Indonesia dari daerah kegelapan ke tempat yang bercahaya. Semakin banyak pembacaan buat penduduk suatu negeri, semakin tinggi keadaban bangsa itu. Itulah suatu ukuran bagi ketinggian derajat suatu bangsa....”

Di Paris, Adinegoro mengamati setidaknya ada 50 surat kabar yang terbit dengan waktu berbeda-beda: pagi, siang, dan malam. Jumlahnya sangat jauh bila dibandingkan dengan yang terjadi di Batavia ketika itu, yang punya empat-lima penerbitan surat kabar.

Catatan perjalanan Adinegoro sejak dari Batavia hingga kemudian Paris, Belanda ini, serta berbagai negara Eropa dimuat secara berseri pada majalah *Pandji Poestaka*. Artikel “Melawat ke Barat” dimuat secara bersambung di majalah itu di bawah rubrik “Perdjalan dan Peladjaran” dan ditaruh di bagian tengah. Cetakan pertama buku *Melawat ke Barat* yang terbit pada 1930.

Artikel-artikel itulah yang kemudian dibukukan menjadi tiga jilid *Melawat ke Barat* oleh Balai Pustaka. Cetakan pertama buku *Melawat ke Barat* terbit pada 1930. Menurut Surasono dalam tulisannya *Seorang Perintis dari Talawi* (Majalah *Editor*, 1987), buku itu menjadi bacaan wajib murid sekolah menengah sebelum Perang Dunia Kedua karena isinya bagus dan bahasanya dinilai baku pada zamannya. Adinegoro juga mengirimkan karangannya ke *Bintang Timoer* di Batavia dan *Pewarta Deli* di Medan.

Di Belanda, Adinegoro menjadi pegawai magang selama enam bulan di sebuah surat kabar di Utrecht. Ada perbedaan keterangan dalam hal ini. Surasono menyatakan Adinegoro menjadi pegawai magang di *Utrecht Courant*, sedangkan Soebagijo I.N. mengatakan Adinegoro “bekerja sukarela” di beberapa surat kabar tanpa menyebut nama medianya.

Menurut A. Der Weduwen dalam *Dutch and Flesmish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618-1700* (2017), *Utrechtse Courant* terbit di Utrecht pada 1675 dan tutup pada 1700. Menurut J. Van de Plasse dalam buku *Kroniek van de Nederlandse dagblad-en opiniepers* (2005), harian yang tercatat terbit di sana pada 1930-an adalah *Utrechts Nieuwsblad*, yang diterbitkan di Utrecht mulai 1893 hingga 1982 dan di Houten dari 1982 hingga 2005. Jadi, besar kemungkinan besar Adinegoro saat itu menjadi pegawai magang di *Utrechts Nieuwsblad*, bukan *Utrecht Courant*.

Adinegoro kemudian belajar jurnalistik di Julius-Maximilians-Universität Würzburg di Würzburg dan di München, Jerman, pada 1926-1930. Di negeri itu, dia belajar jurnalistik, geografi, kartografi, dan filsafat. Pengetahuannya mengenai kartografi membuat dia kemudian menjadi juga ahli membuat peta. Kelak, saat memimpin *Pewarta Deli* dan pecah Perang Dunia Kedua, Adinegoro menyertakan peta lokasi perang di setiap artikel mengenai perang itu sehingga koran tersebut laris bak kacang goreng. Sebab, orang tampaknya ingin mengikuti jalannya peperangan itu melalui peta. Publikasi semacam ini belum lazim pada masa itu.

Awal 1931, perlawatan diteruskannya ke Eropa Tenggara, Turki, Yunani, Italia, Mesir, Abissinia (Ethiopia dan Eritrea sekarang), dan India sebelum pulang ke Batavia. Kisah perjalanannya ini dikumpulkan dalam buku *Kembali dari Perlawatan ke Europa*, yang diterbitkan oleh Sjarikat Tapanoeli, Medan.

Pergerakan Kemerdekaan

Pada 1931, setelah kepulangannya dari Eropa, Adinegoro sempat bekerja pada Majalah *Pandji Poestaka* sebelum kemudian memimpin Harian *Pewarta Deli* di Medan. *Pewarta Deli* merupakan koran berbahasa Melayu pertama di Sumatera. Adinegoro memimpin harian ini dengan memberikan sentuhan khusus keahliannya, yakni membuat peta. Ketika koran ini memberitakan tentang perang dunia kedua, *Pewarta Deli* selalu menyertakan peta sebagai ilustrasi berita tentang pertempuran di Eropa sehingga pembaca paham bagaimana kondisi pertempuran tersebut. Peta ini membuat Koran *Pewarta Deli* laris di pasaran.

Saat Jepang masuk, pemerintahan Jepang melarang semua penerbitan dan di Sumatera hanya ada satu koran, *Sumatra Shimbun* yang berada di bawah kontrol Jepang. Jepang memerintahkan Adinegoro, yang ketika itu sangat menonjol sebagai tokoh wartawan di Medan, memimpin koran tersebut.

Pada 1943, saat Jepang mendirikan Badan Pertimbangan Pusat atau *Chuo Sangi-In*, Adinegoro ditunjuk sebagai salah satu anggota untuk wilayah Sumatera. Tugas lembaga yang mirip parlemen ini antara lain mengawasi kerja pemerintah. Penunjukan jabatan ini ternyata membawa konsekuensi lain. Adinegoro harus pindah ke Bukittinggi, kota yang tentu saja tidak asing baginya. Bersama keluarganya, Adinegoro pun berangkat ke Padang sebelum menuju Bukittinggi, tempat yang dijadikan Jepang sebagai “pusat” kendali pemerintahannya di Sumatera.

Saat pemerintah Jepang kalah perang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sebulan kemudian, September 1945, Presiden Sukarno mengangkat M. Teuku Hasan menjadi Gubernur Sumatera. Sebagai wakil pemerintah pusat, Teuku Hasan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di tanah Sumatera. Sebulan setelah pengangkatan Teuku Hasan, pemerintah menunjuk Adinegoro sebagai wakil pemerintah untuk urusan umum dan penerangan. Untuk jabatan inilah Adinegoro kemudian mendapat pangkat letnan kolonel tituler berikut seragamnya. Tugas Adinegoro antara lain memberi penerangan kepada masyarakat tentang kemerdekaan Republik Indonesia.

Markas Adinegoro tetap di Bukittinggi. Di kota itu, pada 1946, ia memimpin pengambilalihan pemancar radio yang sebelumnya dikuasai Jepang dan menjadikannya sebagai *Radio Republik Indonesia*. Penguasaan stasiun radio tersebut membuat Adinegoro bisa berhubungan dengan Kantor Berita *Antara* di Jakarta dan mendapat informasi berita-berita dari Jakarta. Adinegoro juga menjadikan salah satu bagian rumahnya di Bukittinggi sebagai kantor *Antara* cabang Sumatera.

Untuk menyebarkan berita-berita tentang kemerdekaan, Adinegoro menerbitkan *Kedaoelatan Rakjat*. Harian ini mendapat bahan baku kertas dari sebuah gudang penyimpanan kertas milik Jepang setelah dia bernegosiasi dengan pemegang kuasanya agar kertas-kertas tersebut diserahkan kepada Republik. Sebagai Kepala Penerangan se-Sumatera, Adinegoro terusewartakan kemerdekaan RI sekaligus menjelaskan kepada masyarakat perihal arti kemerdekaan berikut konsekuensi yang harus dilakukan sebagai bangsa yang merdeka. Tulisannya tentang “Indonesia yang telah merdeka” itu tersebar di banyak media, tidak hanya di harian *Kedaoelatan Rakjat*.

Pada 1947 Adinegoro mengajukan permintaan pindah ke Jakarta dengan alasan kondisi kesehatan. Di Jakarta, setelah sekitar setahun kondisi kesehatannya pulih, Adinegoro diminta memimpin majalah *Mimbar Indonesia*, yang didirikan oleh Soepomo, Soekardjo Wirjopranoto, dan Pangeran Mohammad Noor. Soepomo pakar hukum yang ikut dalam perumusan dasar negara di sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945 dan Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI pada 10-17 Juli 1945. Soekardjo adalah tokoh pergerakan dan pengurus majalah Partai Indonesia Raya (Parindra), *Soeara Parindra*. Soepomo, Soekardjo, dan Mohammad Noor adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan.

Menurut Arif Siregar dalam tulisannya, “Soepomo di Dunia Pers: Kiprahnya dalam Majalah *Mimbar Indonesia*”, *Mimbar Indonesia* terbit pertama kali pada 10 November 1947, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Terbit setiap Sabtu dengan tebal 32 halaman, di majalah itu Soepomo menulis berbagai hal yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat. (*Historiography* Volume 1 Tahun 2021).

Saat memimpin *Mimbar Indonesia*, Adinegoro menjadi salah satu wartawan Indonesia yang meliput Konferensi Meja Bundar di Belanda pada 23 Agustus-2 November 1949. Laporan Adinegoro perihal konferensi tersebut—berikut opini-opininya—dimuat di *Mimbar Indonesia*. Saat dilangsungkan penandatanganan penyerahan dan pengakuan kedaulatan oleh Ratu Juliana, Adinegoro menulis, “Kejadian penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember ini hanya sekali, tidak ada duanya lagi, sebab itu hanya angkatan Indonesia yang sekarang saja akan mengalami. Angkatan yang datang kemudian akan mengetahuinya dari buku sejarah....”

Dua tahun Adinegoro memimpin majalah *Mimbar Indonesia* sebelum bertolak ke Belanda pada 1950 untuk proyek pembuatan peta. Proyek ini tak lepas dari posisinya sebagai pendiri penerbitan Djambatan. Di Belanda Adinegoro membuat atlas Indonesia dan atlas dunia berbahasa Indonesia yang merupakan atlas pertama dalam bahasa Indonesia.

Keterlibatan Adinegoro dalam dunia pers Indonesia berlanjut setelah dua tahun kemudian dia kembali ke Tanah Air karena diminta memimpin Kantor Berita *Persbiro Indonesia-Aneta (PIA)*. Presiden Sukarno pada 1954 mengangkat Adinegoro sebagai anggota Dewan Perancang Nasional (Depernas). Pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari golongan fungsional.

Salah satu gagasan Depernas adalah pembangunan Gedung Pola —terletak di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat— yang dimaksudkan sebagai galeri untuk memperlihatkan hasil dan rencana pembangunan pemerintah RI. Pada masa-masa ini, Adinegoro juga ikut mendirikan Perguruan Tinggi Publisistik di Jakarta dan Fakultas Publisistik di Universitas Padjadjaran. Sebelumnya bersama para tokoh pers kemerdekaan, pada 9 Februari, Adinegoro mendirikan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Saat memimpin *PIA*, pada 1956, Adinegoro mengikuti lawatan Presiden Sukarno ke Uni Soviet dan negara Blok Timur lain. Sebelumnya, Adinegoro diajak Bung Karno menunaikan ibadah haji di Mekah. Di sana Bung Karno dan rombongan diterima Raja Arab Saudi, Ibnu Saud. Setahun kemudian, Adinegoro diundang untuk meliput Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat yang membahas masalah Irian Barat.

Selama di sana, Adinegoro melakukan perjalanan jurnalistik ke sejumlah tempat bersama wartawan *Antara*, Soebagijo Ilham Notodidjojo. Tempat yang mereka kunjungi antara lain Dallas, Bendungan Tennessee, dan wilayah yang saat itu menjadi pusat perjuangan orang kulit hitam menuntut persamaan hak, Alabama. Dari Amerika, Adinegoro kemudian terbang ke Jerman sebelum pulang ke Indonesia. Laporan-laporan perjalanan Adinegoro itu dimuat dan disiarkan melalui *PIA*.

Pengembangan Bahasa Indonesia Jurnalistik

Pada 1938 Adinegoro terlibat dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama yang diadakan di Solo. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kongres tersebut antara lain Sanusi Pane, Poerbatjaraka, Mohammad Tabrani, dan Muhammad Yamin. Kongres yang digelar di gedung Societeit Habiprojo, Solo, pada Juni tersebut dalam rangka memperingati sepuluh tahun Sumpah Pemuda. Dalam pertemuan tersebut, Adinegoro menyampaikan pidatonya berjudul “Bahasa Indonesia di Dalam Persoeratkabaran”. Tercatat ada sepuluh pokok pikiran Adinegoro yang disampaikan dalam kongres itu, seperti yang dicatat Harimurti Kridalaksana (1991) yakni:

1. Kongres Bahasa Indonesia pertama ini perlu sekali untuk: (a) menuntaskan segala perubahan dalam bahasa Indonesia yang telah dianggap orang sebagai kemajuan bahasa persatuan; (b) menetapkan batas-batas bahasa Indonesia; (c) menentukan garis-garis kemajuan yang dapat menambah kekayaan bahasa persatuan.
2. Bahasa Indonesia di media massa belum memuaskan dalam segala hal.
3. Bahasa Indonesia di surat kabar adalah tanah yang subur untuk menerima bibit baru dari zaman perubahan.
4. Kewajiban wartawan adalah mengikuti evolusi bahasa Indonesia dan mempercepat jalan evolusi itu.
5. Jalan-jalan baru yang sekarang telah dirambah orang ada yang buntu dan ada yang memiliki banyak harapan akan diterima oleh orang banyak.
6. Selain itu, ada lagi jalan yang kiranya dapat menimbulkan harapan yang luas, seperti pembentukan istilah baru.
7. Yang paling penting bagi pers bukan keindahan bahasa, melainkan kesehatan kehidupan surat kabar.
8. Koran harus dirasakan oleh publik sebagai suatu kebutuhan hidup.

9. Memperbaiki bahasa di dalam akhbar (surat kabar) berarti memperbaiki kehidupan surat kabar.

10. Kemajuan bahasa Indonesia bergantung pada kecerdasan setiap wartawan dan kelapangan pikirannya serta kemajuan jurnalistik Indonesia.

Adinegoro menyatakan bahwa jurnalis harus berusaha memperbaiki bahasa surat kabar dan meminta kongres bekerja sama dengan Persatuan Djoernalis Indonesia (Perdi), yang saat itu dipimpin Parada Harahap. Kongres lalu memutuskan untuk menggelar kongres kedua, yang kemudian dilaksanakan di Medan pada 1954. Kongres Bahasa Indonesia II digelar di Gedung Kesenian Medan dan dibuka oleh Presiden Sukarno. Peserta kongres tercatat 302 orang, yang datang dari pelbagai daerah di Indonesia, juga Belanda, Prancis, dan India. Kongres dibagi atas beberapa seksi yang masing-masing membicarakan topik tertentu.

Adinegoro menjadi pemrasaran tentang bahasa Indonesia dalam pers di seksi E. Pemrasaran lain adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tengku Sjahril, yang menyampaikan topik fungsi bahasa Indonesia dalam pers, dan Kamarsjah dengan tema bahasa Indonesia dalam penyiaran radio.

Seksi E memutuskan bahwa:

- (1) bahasa Indonesia di dalam pers dan radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak;
- (2) bahasa Indonesia di dalam pers dan radio adalah bahasa masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan masyarakat;
- (3) pers dan radio sedapat mungkin berusaha memperhatikan tata bahasa resmi;
- (4) menganjurkan kerja sama yang lebih erat antara pers dan radio dengan balai-balai bahasa.

Salah satu respons atas hasil kongres adalah keputusan pemerintah Indonesia untuk membentuk Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia, yang menghasilkan embrio Ejaan Yang Disempurnakan yang diresmikan pada 1972.

Salah satu peran Adinegoro dalam bahasa Indonesia yang lain adalah penerbitan Istilah Bahasa Indonesia. Buku itu disusun oleh Lembaga Bahasa Indonesia di bawah pengawasan Djawatan Pendidikan dan diterbitkan oleh Tokaiganshu Seityo di Medan pada 1944. Pada masa itu, Jepang menjajah Indonesia dan melarang penggunaan bahasa Inggris dan Belanda di Indonesia sehingga mendorong pemerintah pendudukan Jepang membentuk lembaga yang menyusun peristilahan dalam bahasa Indonesia, khususnya untuk dunia pendidikan.

Lembaga Bahasa Indonesia didirikan di Medan pada 1943 dengan pimpinan Aboe Bakar dan Mangatas Nasoetion. Anggotanya berjumlah 28 orang, seperti Adinegoro, Tengku Amir Hamzah, Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), dan R. Pirngadi. Lembaga ini terdiri atas beberapa bagian. Adinegoro mengetuai bagian kamus dan perbendaharaan kata serta wakil ketua pada bagian pembentukan istilah yang dipimpin Pirngadi. Buku Istilah Bahasa Indonesia merupakan buku pertama tentang istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Buku ini merupakan karya pelopor dalam pengembangan bahasa Indonesia.

Adinegoro menaruh minat besar pada dunia sastra. Ia menulis dua roman, *Asmara Djaja* dan *Darah Moeda*. Perhatian Adinegoro atas bahasa dan sastra membuatnya terlibat dalam debat besar pada masa itu yang dikenal sebagai "Polemik Kebudayaan." Polemik dimulai oleh pernyataan Sutan Takdi Alisjahbana dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo pada 1938. Takdir, dalam *Sejarah Pemikiran Indonesia sampai dengan 1945* (2006), menyerang beberapa pemikir dalam kongres yang dinilainya cenderung anti-egoisme, anti-intelektualisme, dan anti-materialisme.

Menurut Achdiat K. Mihardja (1945), Adinegoro menyatakan bahwa masalah bangsa Indonesia bukan soal intelektualisme, egoisme, dan materialisme, tapi kurangnya kecerdasan, kurang hidupnya individu, terlampau pemurah (kurang egoismenya), dan kurang kuatnya orang mengumpulkan harta dunia. Adinegoro menulis, "Masyarakat bangsa kita yang statis hanya dapat menjadi dinamis kalau kecerdasan bangsa kita diasah setajam mungkin, apabila individu dalam bangsa kita dihidupkan sehidup-hidupnya, apabila sifat pemurah hati yang terlampau besar di kalangan bangsa kita itu dikurangi, apabila di kalbu bangsa kita dibangun pemahaman betapa

besarnya kebutuhan lahir yang sesungguhnya diperlukan dan halal bagi segala manusia di dunia ini.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Adinegoro, caranya melalui pendidikan Barat sehingga orang Indonesia mulai memikirkan dirinya sendiri, tidak takut mengemukakan pendapat, mulai sadar akan haknya sebagai manusia dan anggota bangsa, serta mulai berjuang bagi kepentingan dirinya dan bangsanya. Dengan kata lain, bagi Adinegoro, masalah bangsa ini akan dapat dipecahkan melalui pendidikan Barat. Pandangan ini tampaknya berangkat dari pengalamannya sendiri yang belajar jurnalistik dan hal lain di Eropa.

Perhatian Adinegoro terhadap pendidikan dan perkembangan bahasa Indonesia sangatlah besar. Adinegoro menganjurkan para guru menanamkan daya cipta kepada murid-muridnya. Menurut Adinegoro, daya cipta pada akhirnya akan membuat seseorang kaya ide, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, juga untuk kepentingan publik. Begitulah seharusnya hidup seseorang, kata dia, yakni berguna untuk lingkungannya.

Melawan Pers PKI

Pada 1951 Adinegoro pulang ke Indonesia. Adinegoro, yang saat itu tengah menyelesaikan proyek pembuatan atlas berbahsa Indonesia di Belanda, diminta Burhanddin Mohammad Diah, Ketua Perserikatan Persuratkabaran Indonesia (PPI), untuk memimpin Kantor Berita *Persbiro Indonesia-Aneta*.

Aneta sebelumnya adalah kantor berita milik Dominique Willem Berretty, blasteran Jawa-Italia. *Aneta* didirikan Berretty pada 1 April 1917. Berretty awalnya bukan wartawan, melainkan pegawai pos. Dia kemudian menjadi korektor pada surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad* sebelum pindah ke *Jawa Bode* untuk menjadi redaktur. *Aneta* menjalin hubungan dengan sejumlah kantor berita asing dan biro pers internasional, seperti *Reuters* (Inggris), *Havas* (Prancis), *Transocean* (Jerman), dan *Domei* (Jepang). *Aneta* kemudian menjual berita-berita itu kepada pelanggan mereka, yakni surat kabar di Jawa dan luar Jawa serta stasiun radio penyiaran milik pemerintah Belanda. Dalam waktu singkat, berkat monopoli berita, Berretty menjadi kaya raya. Ia mendirikan sejumlah kantor *Aneta*, antara lain di Jakarta dan di vila mewahnya di Bandung yang ia beri nama *Isola*—kini menjadi kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Pada 22 Desember 1934 Berretty tewas saat pesawat yang tengah membawanya dari Belanda ke Hindia Belanda jatuh.

Setelah Indonesia merdeka, PPI membeli Kantor Berita *Aneta*. Penyerahan secara resmi *Aneta* kepada PPI dilakukan pada 31 Maret 1951. *Aneta* kemudian bersalin nama menjadi *Persbiro Indonesia-Aneta (PIA)*. Kendati *Aneta* sudah berpindah tangan, semua pegawainya tidak serta-merta berhenti. Sebanyak 18 pegawai asal Belanda, sesuai dengan perjanjian, tetap bekerja di sana hingga kontrak mereka habis. Hanya, berita-berita di bawah kontrol PPI tidak lagi menyuarakan kepentingan pemerintah Belanda.

Sebagai direktur, Adinegoro menghadapi desakan pemberhentian pegawai-pegawai Belanda. Pada pertengahan 1953, muncul petisi yang mendesak *PIA* memulangkan semua karyawan Belanda. Adinegoro tidak bisa serta-merta memberhentikan para pegawai itu karena mereka terikat kontrak. Baru pada 1956 *PIA* “bersih” dari orang Belanda. Pada 6 November, nama Kantor Berita *Persbiro Indonesia-Aneta* resmi menjadi *Persbiro Indonesia* tanpa embel-embel *Aneta*.

Kendati *PIA* sudah seratus persen dikendalikan oleh wartawan-wartawan Indonesia, halangan bukan berarti hilang. Suasana politik yang menempatkan kaum komunis di atas angin menerpa pula kantor berita yang dinakhodai Adinegoro itu. Serangan pertama berupa tuduhan bahwa *Persbiro Indonesia* dikuasai Masyumi. Tuduhan kaum komunis ini merujuk pada Direktur Yayasan *PIA* yang dipegang Mohammad Sardjan, Pemimpin Umum *Abadi*, surat kabar milik Partai Masyumi. Selain itu, di sana ada Pemimpin Redaksi Surat Kabar *Keng Po* Injo Beng Goat, yang duduk sebagai Sekretaris Yayasan. Kaum komunis menunjuk adanya dua orang itu sebagai tanda bahwa *Persbiro Indonesia* kantor berita “kaum kanan”. Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi dikenal sebagai partai politik yang kerap mengkritik Presiden Sukarno, terutama berkaitan

dengan kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Pada 1960, Presiden Sukarno membubarkan Masyumi.

Di Indonesia saat itu, selain *Aneta*, telah berdiri kantor berita *Antara*. Para pendiri *PIA* menilai adanya dua kantor berita bukan masalah. Justru hal itu akan membawa kebaikan bagi perkembangan pers. Dalam edisinya beberapa hari setelah *PIA* resmi dikelola wartawan Indonesia, harian *Pedoman* menulis tentang munculnya *PIA* dalam kaitan dengan keberadaan *Antara* yang saat itu dikendalikan orang-orang PKI (Partai Komunis Indonesia). “Kini, dengan hilangnya *monopoly title* dari *Antara* dan munculnya *PIA* sebagai kantor berita nasional pula, maka kita boleh berharap perkembangan yang sehat dalam lapangan kantor berita di negeri ini. Perkembangan sehat itu kiranya akan lebih cepat bisa terlaksana apabila subsidi pemerintah untuk *Antara* (kalau tidak salah Rp 300 ribu setahun) dihapuskan sama sekali. Sebab pers yang dapat sokongan atau subsidi pemerintah tidak merasa diri 100 persen bebas.”

Pernyataan “seratus persen nasional” tersebut disangsikan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). Sebuah panitia yang diketuai Asa Bafaqih dan Hasyim Mahdan kemudian melakukan penelitian. Hasilnya, seperti dilaporkan kepada SPS, “*PIA* belum lagi nasional seratus persen berhubung masih ada anggota peserta yang masih disangsikan kenasionalannya, yakni surat kabar *Sin Po*.”

Sementara itu, persetujuan antara *PIA*—yang beranggotakan 25 surat kabar—dan surat kabar lain yang mendukung PKI makin tajam. Harian *Pemuda*, surat kabar yang menyuarakan kepentingan PKI, menurunkan sejumlah judul berita yang menuding *PIA* tidak mendukung Presiden Sukarno. Dalam berita berjudul “Pers Biro *PIA* Harus Ditutup”, misalnya, Harian *Pemuda*, selain menulis bahwa *PIA* sebelumnya adalah Kantor Berita *Aneta* yang menentang kemerdekaan Indonesia, menjelaskan bahwa *PIA* dipimpin tokoh Masyumi, Mohammad Sardjan, dan statusnya tidak terang.

PIA menampik tuduhan *Pemuda*. “Tidak terangnya itu hanya buat orang-orang yang malas mencari kebenaran dan malas bertanya pada orang yang tahu-menahu. Sejarah pengambilalihan *PIA* jauh sebelum ada peristiwa pengambilalihan di tahun 1957 dan dengan tidak merugikan, malahan menguntungkan pada perkembangan pers Indonesia yang jurnalistiknya berdasarkan kode etik jurnalistik yang menjauhkan diri dari segala fitnah, tuduhan, dan hasutan, sebagai jalan membuat laku koran,” tulis Adinegoro membalas “serangan” *Pemuda*.

Harian *Pemuda* menuntut pemerintah menutup *PIA* dengan sejumlah alasan, antara lain status *PIA* tidak jelas dan *PIA* membela kepentingan Belanda. Pada akhir 1957, karyawan *PIA* yang tergabung dalam Persatuan Pegawai Persbiro Indonesia mengeluarkan pernyataan menolak tuduhan harian *Pemuda*. Menurut Soebagijo, semua yang dilakukan oleh harian *Pemuda* tak lepas dari ketakutan bahwa *PIA* akan melawan atau menghalangi langkah-langkah kaum komunis.

Persaingan *PIA* dengan *Antara* memang tak terelakkan. *PIA* saat itu memiliki sekitar 200 karyawan dan jumlah pelanggannya sebanyak 62 surat kabar di Jawa dan luar Jawa. Di luar itu, pelanggan buletin-buletinnya mencapai sekitar seribu lebih, baik instansi maupun perorangan. Pada akhirnya muncul suara-suara untuk menggabungkan keduanya buat kepentingan nasional.

Adinegoro tak menolak rencana penggabungan itu. Menurut dia, jikapun kemudian *PIA-Antara* dilebur, hal yang utama adalah penyatuan itu tidak merugikan kedua belah pihak dan tak ada pemberhentian karyawan. Adapun pengurusnya, Adinegoro menambahkan, sebanyak mungkin terdiri atas wakil surat kabar, wakil perkumpulan wartawan, dan wakil resmi pemerintah. Pengurus itu nanti mengangkat pengurus harian. Adinegoro mengusulkan nama “*Aneta-Antara*” untuk kantor berita itu. Hanya, kata “*Aneta*” harus dijelaskan bukan lagi akronim *Algemeen Nieuws-en Telegraaf-Agentschap*, tapi “*Asiatic News & Telegraph Agency-Antara*”. Di luar nama itu, menurut Adinegoro, bisa juga namanya “*Indonesian Press Agency*”.

Seiring dengan makin naik daunnya PKI, Presiden Sukarno memerintahkan penggabungan *PIA* ke *Antara* pada 14 Oktober 1962. Tertuang dalam Instruksi Penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1962, disebutkan dasar pertimbangan penggabungan tersebut, “Bahwa fusi kantor berita nasional yang kuat dan lengkap sebagai media dalam rangka keseluruhan alat revolusi, khususnya dalam pelaksanaan Tri Komando Rakyat, adalah mempunyai arti penting, dan bahwa oleh karenanya diusahakan rintisan pembangunan suatu kantor berita nasional yang kuat

dan lengkap.” Pada 13 Desember 1962—bertepatan dengan hari ulang tahun *Antara* ke-25—Presiden Sukarno mengeluarkan surat keputusan penyatuan *PIA* dengan *Antara*.

Berkaitan dengan penggabungan dua kantor berita tersebut, dilantik pula anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pimpinan *Antara* yang baru pada 18 Desember 1962 di Istana Negara. Kepada 20 anggota Dewan Pengawas dan 10 anggota Dewan Pimpinan *Antara* yang dilantik, Presiden Sukarno menginstruksikan *Antara* menjalankan pemberitaan yang memihak kepada revolusi dan yang menguntungkan revolusi.

Dalam daftar anggota Dewan Pimpinan *Antara*, Ketua Pandoe Kartawigoena dan Wakil Ketua I Djawoto menjadi pimpinan dewan redaksi. Adapun Adinegoro memimpin bidang riset, dokumentasi, dan pendidikan. Jabatan yang diberikan kepada Adinegoro itu jelas jauh dari posisinya semula di *PIA*. Tidak ada fasilitas yang diberikan kepada Adinegoro. Ia menempati ruangan kecil dengan lampu redup.

Soebagijo I.N. dalam bukunya, *Lima Windu Antara* (1978) menulis, pada akhir 1965 praktis *Antara* sudah dikuasai kaum komunis. Tidak hanya menempatkan orang-orangnya di *Antara*, PKI juga menugasi sejumlah anggotanya ke Persatuan Wartawan Indonesia dan Serikat Penerbit Surat kabar. Agresifnya orang komunis masuk ke segala bidang tak lepas dari ideologi Nasakom—Nasionalisme, Agama, dan Komunisme—yang digelorakan Presiden Sukarno pada era Demokrasi Terpimpin. Koran-koran PKI atau yang condong kepada PKI secara bergiliran menghantam koran non-PKI tentang sesuatu persoalan.

Di Kantor Berita *Antara*, yang menjadi tokoh “kaki tangan” komunis adalah Djawoto dan Soeroto, keduanya wartawan. “Berhasilnya PKI menyusupkan Djawoto dan Soeroto ke dalam *Antara* merupakan keberhasilan yang cukup menggembirakan,” tulis Soebagijo. Jauh sebelum terjadinya penggabungan *PIA* dengan *Antara*, menurut Soebagijo, *Antara* menjadi target dan harus ada di bawah PKI.

Di *Antara* sendiri ketika itu muncul tiga organisasi karyawan, yakni Sarekat Buruh Pekabaran Antara (SBPA) yang pro-PKI, Ikatan Karyawan Antara (Ikrrar) yang anggotanya berasal dari *PIA*, dan Ikatan Karyawan Antara (IKA) yang anggotanya karyawan yang menentang kaum komunis. Ketika itu, menurut Soebagijo, “Keadaan *Antara* memang sudah hampir seluruhnya dikuasai oleh SBPA (PKI).”

Merasa di atas angin dan telah menguasai *Antara*, SBPA pada 1965 merencanakan kongres besar-besaran dengan mengundang semua buruh *Antara* di Indonesia. Tapi, belum lagi kongres terselenggara, terjadi peristiwa G-30-S.

Peristiwa G-30-S mengempaskan PKI dan kemudian menumbangkan kekuasaan Presiden Sukarno. Orde Baru muncul dan pembersihan terhadap kaum komunis dilakukan dengan cepat, termasuk di Kantor Berita *Antara*. Pemerintah Orde Baru segera “meletakkan” Letnan Kolonel Noor Nasution sebagai pemimpin *Antara*. Orde Baru memastikan peran *Antara* pada peristiwa G-30-S adalah sebagai “sentral komando di bidang media massa dan hubungan radio ke daerah-daerah”. Tercatat ketika itu sebanyak 115 karyawan *Antara* diperiksa karena diduga terlibat atau berkaitan dengan peristiwa G-30-S.

Berbeda saat di Aneta, Adinegoro di *Antara* tak memiliki “kekuasaan” dalam bidang redaksional. Ruang kerjanya juga jauh dari memadai. Ia menempati sebuah ruang terpencil di bagian belakang dekat percetakan. Kondisi ini rupanya mempengaruhi jiwa dan raganya. Di rumah, seperti penuturan salah satu anaknya, Adiwarsita, dalam wawancara pada Februari 2023, Adinegoro menjadi lebih pendiam. Pada awal Januari Adinegoro sakit dan kemudian dirawat di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta Pusat, sebelum kemudian meninggal pada 8 Januari 1967. Ia dimakamkan di Taman Pemakanan Karet. Pemerintah pada 1974 menganugerahkan penghargaan kepada Adinegoro sebagai “Perintis Pers Indonesia.”

Karya Penting Adinegoro

Selama hidupnya Adinegoro telah menulis sekitar 25 buku tentang berbagai hal: jurnalistik, roman, bahasa, hingga ensiklopedi. Adinegoro selain tercatat sebagai pembuat atlas

Indonesia dan atlas dunia berbahasa Indonesia pertama juga merupakan orang Indonesia pertama yang membuat ensiklopedi dalam bahasa Indonesia.

Salah satu buku terpenting Adinegoro adalah *Falsafah Ratu Dunia* (1949). Dalam buku setebal 160 halaman itu Adinegoro mengulas pers secara luas: pers dan kritik, pers dan demokrasi, hingga sejarah pers di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet (sekarang Rusia).

Banyak yang mengira “Ratu Dunia” merupakan sebutan untuk pers atau wartawan yang diciptakan Adinegoro. Menurut Adinegoro, Ratu Dunia bukan pers, melainkan “anggapan umum”. “Anggapan umum itu ibarat air sungai, dalam keadaan biasa mengalir dengan tenang, anak-anak bermain di tepinya dengan tiada berbahaya, tetapi tiba-tiba hujan besar berturut-turut, maka sungai itu banjir, tepian tempat mandi, rumah dan hewan hanyutkannya. Air sungai yang tenang menjadi air bah, sifatnya yang senyum simpul menjadi liar, suaranya yang riang menjadi menderum, warnanya yang putih bersih menjadi keruh, itulah lambang masyarakat dan negara dalam revolusi,” tulis Adinegoro dalam pengantar *Falsafah Ratu Dunia*.

Menurut Adinegoro, anggapan umum bisa dibentuk seperti air sungai, bisa dibendung dan dialirkan menurut “acuan”, galian terusan. Namun, untuk membentuknya, perlu pengetahuan tentang dasar-dasar anggapan umum, tentang syarat-syarat pembentukan dan teknikanya. “Dan pers adalah alat paling berharga untuk mengetahui anggapan umum dalam suatu negara, masyarakat, atau daerah,” tulis Adinegoro. Pers merupakan alat terpenting membangun anggapan umum—demikian kata Adinegoro.

Dalam menulis tentang anggapan umum, Adinegoro mencontohkan peristiwa revolusi di sejumlah negara serta pemikiran para filsuf berkaitan dengan negara dan demokrasi, seperti Montesquieu dan John Locke hingga masa sebelumnya, Sokrates. Menurut dia, syarat kemajuan anggapan umum adalah demokrasi, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan melahirkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kemerdekaan berkumpul serta bersidang, juga keramaian penduduk negeri.

Pers, kata dia, dapat membentuk pendapat umum. Pengaruhnya bisa menerbitkan antipati (kebencian) dan simpati (persetujuan). Mengutip sejumlah ahli yang melakukan penyelidikan tentang meletusnya Perang Dunia Pertama, menurut Adinegoro, “Perang dunia itu mungkin tak terjadi jika saat itu pers tidak mengobar-ngobarkan api peperangan tersebut.” Pers, Adinegoro melanjutkan, berfaedah bagi pemerintah dan masyarakat jika ia menjadi pembentuk pendapat umum, mengkritik pemimpin-pembesar yang bertanggung jawab terhadap rakyat. “Kritik memang tidak enak, akan tetapi barangsiapa di antara pembesar dan pemimpin yang mengerti akan gunanya dan kepentingannya pers, *press-minded* tidak akan naik pitam terus, apabila perbuatannya atau tindakannya atau anggapannya ditinjau oleh seorang wartawan yang juga merasa bertanggung jawab kepada rakyat umumnya dan terhadap pembaca khususnya.”

Adinegoro mengibaratkan hubungan pers dengan masyarakat seperti bulan yang beredar mengelilingi bumi. Bulan sebagai pers, bumi adalah masyarakat, dan pemerintah sebagai matahari yang mempengaruhi sepenuhnya keadaan pers dan masyarakat. Pers dilahirkan dan dibesarkan oleh masyarakat. Namun, kata Adinegoro, pers juga bisa dirobokkan oleh masyarakat. Adapun jurnalistik merupakan kepandaian untuk menulis hal-hal yang baru terjadi dengan cara menarik perhatian dengan maksud diketahui sebanyak-banyaknya orang dan secepat-cepatnya.

Falsafah Ratu Dunia memuat beragam pemikiran Adinegoro yang diikat dengan benang merah pers. Selain Anggapan Umum dan Ratu Dunia, bab yang lain adalah Demokrasi dan Pers, Pers dan Masyarakat, Sejarah Pers, Selayang Pandang Surat Kabar, Kritik dan Polemik, Surat-an Sudut, Negeri yang Miskin Pengarang Kaya Pembaca, Jenis Perpustakaan, Membina Kebudayaan Indonesia, Perebutan Kekuasaan Anggapan Umum, serta Kemerdekaan Menulis. Adinegoro juga melampirkan sejumlah sumber literatur berkaitan dengan buku yang ditulisnya tersebut.

Adinegoro menegaskan bahwa koran-media tidak boleh digunakan wartawan untuk kepentingan sendiri, tapi semata buat kepentingan umum. Hati seorang wartawan, menurut dia, tidak boleh mengandung dendam sehingga dalam membicarakan kedudukan seseorang, bukan orang itu yang menjadi ukuran dan alasan kritik, melainkan perbuatan dan buah pikirannya.

Pendapat Adinegoro hingga kini jelas tetap berlaku. Artinya buku yang diterbitkan lebih dari 70 tahun silam tersebut masih relevan. Pemikiran Adinegoro tentang pers tak lekang oleh zaman.

Diskusi

Artikel ini ingin menjelaskan peran dan kontribusi Adinegoro pada jurnalisme di Indonesia. Dari paparan pada bagian temuan penelitian di atas, bisa diketahui keterlibatan Adinegoro pada kegiatan jurnalisme dimulai ketika dia kuliah di Sekolah Dokter Jawa (STOVIA) di Batavia. Perpustakaan STOVIA tidak hanya menyediakan buku-buku, tapi juga majalah dan surat kabar yang menarik Adinegoro untuk menulis. Kecintaannya pada jurnalistik membuat Adinegoro rela meninggalkan pendidikan dokter di STOVIA untuk belajar jurnalistik di Eropa.

Tulisan-tulisan Adinegoro selama perjalanan dengan kapal serta kunjungannya ke beberapa kota di negara-negara Eropa menjadi kontribusi awal Adinegoro dalam memelopori dan mempraktikkan jurnalisme perjalanan. Laporan perjalanan Adinegoro tidak sekadar menyampaikan apa yang dia lihat, tapi juga dia kaitkan dengan sejarah, kebudayaan, industry, dan lainnya. Laporan perjalanan Adinegoro dimuat beberapa surat kabar, dan kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul *Melawat ke Barat*. Ketika pulang dari menuntut ilmu, Adinegoro juga menulis catatan perjalanan yang dimuat di surat kabar, kemudian diterbitkan menjadi buku yang berjudul *Kembali dari Perlawatan ke Europa* (1930).

Kontribusi lain Adinegoro dalam praktik jurnalistik adalah pengembangan infografis dalam bentuk menggunakan peta sebagai ilustrasi laporan berita, terutama dalam pemberitaan perang dunia kedua. Pengembangan infografis berupa peta dalam pemberitaan itu tak lepas dari ilmu yang dipelajari Adinegoro di Eropa, yakni jurnalistik, geografi, kartografi, dan filsafat. Pengetahuannya mengenai kartografi membuat dia kemudian menjadi ahli membuat peta. Keahlian ini digunakan Adinegoro saat memimpin *Pewartu Deli* dan pecah Perang Dunia Kedua, yakni menyertakan peta lokasi perang di setiap artikel mengenai perang itu sehingga koran tersebut laris. Penggunaan infografis dalam bentuk peta ini sebuah inovasi penting karena praktik seperti tersebut belum lazim pada masa itu.

Adinegoro juga berkontribusi besar dalam pengembangan Bahasa Indonesia jurnalistik sebagai alat utama bagi wartawan dalam menulis berita. Kontribusi tersebut ia lakukan lewat keterlibatannya dalam Kongres Bahasa Indonesia maupun praktik penulisan berita yang ia terapkan. Sebagai respons atas hasil Kongres Bahasa, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia, yang menghasilkan embrio Ejaan Yang Disempurnakan yang diresmikan pada 1972. Peran lain Adinegoro dalam bahasa Indonesia adalah penerbitan Istilah Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Lembaga Bahasa Indonesia di bawah pengawasan Djawatan Pendidikan dan diterbitkan oleh Tokaiganshu Seityo di Medan pada 1944. Dalam pengembangan Bahasa Indonesia jurnalistik, Adinegoro menekankan bahwa media pertamanya harus memperhatikan kebenaran dan kecermatan berbahasa. Menurut Adinegoro, bahasa media yang baik akan menjaga kebudayaan sebuah bangsa.

Sebagai seorang wartawan yang berpendidikan tinggi, Adinegoro memiliki sejumlah gagasan dan pemikiran dalam bidang pers dan jurnalisme yang dia sampaikan lewat tulisan-tulisannya. Di antara pemikiran tentang pers dan jurnalisme itu dia tulis dalam buku *Falsafah Ratu Dunia* yang antara lain membahas tentang pers dan kritik, pers dan demokrasi, hingga sejarah pers di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. "Ratu Dunia", menurut Adinegoro, adalah anggapan umum, yang bisa diibaratkan sebagai air sungai yang bisa mengalir tenang, tapi bisa juga mengalir deras, bahkan menjadi air bah yang berbahaya. Pers merupakan alat terpenting untuk mengetahui dan membangun anggapan umum.

Adinegoro juga memiliki peran dan kontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pers perjuangan, yakni pemanfaatan pers nasional Indonesia sebagai alat perjuangan dalam pergerakan kemerdekaan. Peran dan kontribusi itu ia berikan lewat tulisan-tulisannya maupun keterlibatannya dalam berbagai peristiwa. Pascaproklamasi kemerdekaan, Adinegoro ditunjuk menjadi wakil pemerintah di Sumatera untuk urusan umum dan penerangan, dengan tugas antara lain memberi penerangan kepada masyarakat tentang kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada 1946 ia memimpin pengambilalihan pemancar radio di Bukittinggi, yang sebelumnya dikuasai Jepang, dan menjadikannya sebagai *Radio Republik Indonesia*. Adinegoro juga menjadikan salah satu bagian rumahnya di Bukittinggi sebagai kantor *Antara* cabang Sumatera. Untuk menyebarluaskan berita-berita tentang kemerdekaan, Adinegoro menerbitkan *Kedaoelatan Rakjat*. Tulisannya tentang “Indonesia yang telah merdeka” tersebar di banyak media, tidak hanya di *Kedaoelatan Rakjat*.

Adinegoro juga berperan dalam meliput Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, dan menyebarkan hasil-hasilnya lewat laporan berita. Keahliannya dalam bidang kartografi menjadikan Adinegoro sebagai pembuat peta dengan Bahasa Indonesia pertama. Adinegoro pernah menduduki jabatan publik sebagai anggota Dewan Perancang Nasional dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, selain jabatan di surat kabar dan kantor berita.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa peran dan kontribusi Adinegoro pada jurnalisme di Indonesia sangat signifikan. Peran dan kontribusi Adinegoro itu dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, peran dan kontribusi Adinegoro dalam praktik jurnalistik, yang meliputi kepeloporannya dalam praktik jurnalisme perjalanan, pengembangan dan penerapan Bahasa Indonesia jurnalistik, dan pengembangan infografis (peta) dalam laporan jurnalistik.

Kedua, peran dan kontribusi Adinegoro dalam pemikiran pers dan jurnalisme, yang antara lain berbicara tentang pers dan demokrasi, pers dan kritik, sejarah pers, hingga pendapat umum. Ketiga, peran dan kontribusi Adinegoro dalam memanfaatkan jurnalistik dan pers sebagai sarana untuk memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Kehidupan dan perjalanan karir Adinegoro sebagai wartawan memperlihatkan bahwa kreatifitas dan terus berpikir merupakan sebuah keharusan bagi seorang jurnalis. Di luar itu, Adinegoro mengajarkan bahwa wartawan seharusnya haus akan ilmu, belajar apa saja yang akan memperkaya dan menambah nilai karyanya. Adinegoro membuktikan perihal itu dengan tidak hanya belajar mengenai jurnalisme di Eropa, tapi juga belajar filsafat, sosiologi dan kartografi.

Bahasa sebagai “mahkota” wartawan telah diperlihatkan Adinegoro sejak muda dengan memberi perhatian besar kepada bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia jurnalistik, seperti ia sampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada 1938. Adinegoro menekankan bahwa media pertama-pertama harus memperhatikan kebenaran dan kecermatan berbahasa. Media yang memakai bahasa buruk menunjukkan pula kualitas dari media itu, kata dia, sedangkan bahasa media yang baik akan menjaga kebudayaan sebuah bangsa.

Peran dan keterlibatan Adinegoro dalam masalah-masalah kebangsaan --seperti menjadi wakil pemerintah pusat di Sumatera, anggota MPR, dan anggota Badan Perancang Nasional-- menunjukkan sisi lain dari sosoknya: integritas dan kemampuannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik. Adinegoro sesungguhnya potret dari bagaimana seharusnya seorang wartawan: pekerja keras, berintegritas, dan memiliki kreatifitas yang tak pernah redup yang dibuktikan dengan banyak karya-karyanya. Selain karya jurnalistik, Adinegoro juga menghasilkan karya sastra, lalu menjadi pembuat pertama atlas Indonesia dan atlas dunia berbahasa Indonesia, pembuat pertama ensiklopedi Indonesia, pembuat pertama kamus istilah-istilah Indonesia, dan sebagainya.

Dengan peranan dan sumbangsuhnya terhadap bangsa dan negara, khususnya dalam bidang pers dan jurnalisme, sangat wajar dan tepat pemerintah memberinya gelar Perintis Pers Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia mengabadikan namanya sebagai nama penghargaan karya jurnalistik terbaik setiap tahun yang diberikan pada peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari. []

5. REFERENSI

Buku

- Adinegoro. (1949). *Falsafah Ratu Dunia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Adinegoro. (1930). *Kembali dari Perlawatan ke Europa*. Medan Deli: N.V. Handel Mij & Drukkerij.
- Adinegoro. (1987). *Melawat ke Barat*. Jakarta: CV Masagung.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Los Angeles: SAGE.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah (Edisi Revisi 2), Cet. Ke-2*. Bandung: Satya Historika.
- Ismaun dkk, (2016). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah.
- Kridalaksana, H. (1991). *Masa Lampau Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mihardja, A.K. & Alisjahbana, S.T. (1977). *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Rahzen, T. (2008). *Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007*. Jakarta: Iboekoe.
- Soebagijo, I.N. (1987). *Adinegoro Pelopor Jurnalistik Indonesia*. Jakarta: CV Masagung.
- Soebagijo, I.N. (1987). *Lima Windu Antara*. Jakarta: LKBN Antara
- Surjomihardjo, A. (2004). *Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Umasih. (2006). *Sejarah Pemikiran Indonesia sampai 1945*. Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah.

Jurnal, berkala, dan lainnya

- Historiagraphy*, Volume 1, 2001
- Kompas (2021). Stovia Sekolah Dokter Zaman Hindia Belanda*.
- Majalah Editor (1987). *Seorang Perintis dari Talawi*.
- Majalah *Tempo* (2014). *Edisi Khusus Muhammad Yamin*.
- Wawancara Anita, putri Adinegoro, Oktober 2023.